



Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pengembangan Pantai Binasi Kabupaten Tapanuli Tengah

The Effect of Policy Implementation on the Effectiveness of Binasi Beach Development, Central Tapanuli Regency

Putra Felix Pradana Sianturi & Rudi Salam Sinaga*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas pengembangan Pantai Binasi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Model implementasi kebijakan Edward III digunakan sebagai kerangka analisis dengan empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik korelasional, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner dan dokumentasi yang melibatkan pegawai Dinas Pariwisata, pelaku usaha, dan wisatawan. Analisis data dilakukan menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment dan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal dalam mendukung pengembangan Pantai Binasi. Kendala utama meliputi koordinasi yang lemah, keterbatasan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat, serta tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Meskipun jumlah wisatawan meningkat dari 10.000 pada tahun 2020 menjadi 30.000 pada 2023, pertumbuhan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi lokal. Oleh karena itu, strategi yang disarankan mencakup penguatan koordinasi antar-stakeholder, peningkatan infrastruktur, optimalisasi pemasaran digital, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Dengan kebijakan yang lebih efektif, Pantai Binasi dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan; efektivitas pariwisata; Pantai Binasi; pengembangan wisata; kebijakan pariwisata.

Abstract

This study evaluates the influence of policy implementation on the effectiveness of Binasi Beach development in Central Tapanuli Regency. Edward III's policy implementation model is used as an analytical framework with four main indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a quantitative method with a correlation technique, where data is collected through questionnaires and documentation involving Tourism Office employees, business actors, and tourists. Data analysis was carried out using Pearson Product Moment correlation test and simple linear regression. The results of the study show that the implementation of policies has not been optimal in supporting the development of Binasi Beach. The main obstacles include weak coordination, budget limitations, lack of community participation, and challenges in environmental management. Although the number of tourists increased from 10,000 in 2020 to 30,000 in 2023, this growth has not had a significant impact on the local economy. Therefore, the suggested strategies include strengthening coordination between stakeholders, improving infrastructure, optimizing digital marketing, empowering the community, and better managing the environment. With more effective policies, Binasi Beach can develop into a sustainable leading tourist destination.

Keywords: Policy implementation; tourism effectiveness; Binasi Beach; tourism development; tourism policy.

How to Cite: Sianturi, P.F.P. & Sinaga, R.S. (2025). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pengembangan Pantai Binasi Kabupaten Tapanuli Tengah. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(1) 2025: 68-76,

*E-mail: rudisalam@staff.uma.ac.id

ISSN 2721-7507 (Online)



PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi wilayah yang memiliki potensi wisata alam (Hardiman Sihombing et al., 2023; Susilo et al., 2022). Kabupaten Tapanuli Tengah, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu daerah dengan garis pantai yang cukup panjang, mencapai lebih dari 200 kilometer. Kawasan ini menyimpan berbagai potensi wisata bahari yang dapat dikembangkan sebagai destinasi unggulan, salah satunya adalah Pantai Binasi di Kecamatan Sosorgadong. Dengan hamparan pasir putih dan ombak yang cocok untuk aktivitas bahari, Pantai Binasi mulai menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Keindahan pantai ini juga didukung oleh kondisi alam yang masih relatif asri dan keberagaman hayati yang memungkinkan pengembangan ekowisata (Khairunnisa, 2023; Kristin & Salam, 2016).

Namun, meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan Pantai Binasi masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pengembangan kawasan tersebut. Salah satu kendala utama adalah implementasi kebijakan pengembangan yang belum optimal, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah merancang berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya tarik wisata Pantai Binasi, seperti pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan layanan wisata, serta pemberdayaan masyarakat setempat (Tanjung et al., 2024). Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara efektif akibat keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar-stakeholder, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata.

Jumlah wisatawan ke Pantai Binasi meningkat dari 10.000 pada tahun 2020 menjadi 30.000 pada 2023, tetapi pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan, area parkir, dan fasilitas umum. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, dengan hanya 30% dari total anggaran pariwisata yang dapat direalisasikan (Bappeda Tapanuli Tengah, 2023), menyebabkan banyak proyek tertunda. Selain itu, koordinasi yang lemah antarinstansi, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup, menyebabkan kebijakan tumpang tindih dan inefisiensi anggaran. Tanpa koordinasi yang lebih baik dan kebijakan yang berkelanjutan, pengembangan Pantai Binasi berisiko kehilangan daya tarik jangka panjang.

Peningkatan jumlah wisatawan di Pantai Binasi membawa dampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah dan kelestarian ekosistem pantai. Data dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan bahwa sekitar 40% sampah di pantai berasal dari pengunjung, menandakan rendahnya kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan (Annisa et al., 2024; Situngkir et al., 2022). Selain itu, aktivitas wisata yang tidak terkontrol menyebabkan erosi pantai, penurunan kualitas air laut, dan kerusakan terumbu karang. Meskipun telah ada upaya konservasi seperti penanaman mangrove dan patroli lingkungan, implementasinya masih sporadis dan belum terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan wisata. Diperlukan strategi yang lebih kuat dalam pengawasan, edukasi, dan pelibatan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan ekosistem Pantai Binasi (Manurung et al., 2022; Simatupang, 2019; Thohirin, 2016).

Salah satu kebijakan yang telah diupayakan adalah pelatihan bagi masyarakat dalam bidang pemandu wisata, pengelolaan homestay, serta pembuatan produk kerajinan lokal (Faustyna, 2023; Sartini et al., 2023; Wirman et al., 2018). Namun, efektivitas program ini masih terbatas karena kurangnya kesinambungan dalam implementasi serta minimnya dukungan dari sektor swasta dan investor. Padahal, dengan keterlibatan aktif masyarakat, pengelolaan Pantai Binasi dapat lebih berorientasi pada keberlanjutan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar (Badung & Regency, 2024; Mayolita Panjaitan et al., 2023; Susilo et al., 2022).

Masyarakat lokal memiliki peran krusial dalam pengelolaan Pantai Binasi, namun keterlibatan mereka masih rendah akibat minimnya program pemberdayaan yang sistematis (Batubara, 2019; Pratama, 2023). Survei Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat berminat berpartisipasi dalam sektor pariwisata, tetapi terhambat oleh keterbatasan keterampilan, modal usaha, dan akses pelatihan. Dukungan yang lebih terarah diperlukan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan wisata secara berkelanjutan (Albertoras Telaumbanua et al., 2023; Marini et al., 2023; Sitorus & Simanjuntak, 2023).

Berbagai penelitian telah mengkaji implementasi kebijakan pariwisata dan sektor lainnya. Nuraida (2023) menemukan kebijakan pariwisata di Pangandaran cukup efektif dalam meningkatkan layanan, sementara Agniy dan Heryani (2023) menunjukkan bahwa anggaran, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat memengaruhi efektivitas pengelolaan wisata pantai di Tasikmalaya. Dianindarwati et al. (2023) menilai kebijakan pengembangan wisata di Makassar sudah cukup baik dalam aspek komunikasi dan birokrasi. Berbeda dari studi sebelumnya, penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi kebijakan dalam pengembangan Pantai Binasi di Tapanuli Tengah untuk mengevaluasi kontribusinya terhadap pariwisata berkelanjutan.

Penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dengan mengevaluasi pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas pengelolaan Pantai Binasi, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari perspektif sosial dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji seberapa efektif kebijakan yang telah diterapkan, tetapi juga mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasi serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pengembangan Pantai Binasi telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan kawasan wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode korelasional dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara implementasi kebijakan (X) dan efektivitas pengembangan pariwisata (Y). Model implementasi kebijakan Edward III digunakan sebagai kerangka kerja utama, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai indikator utama. Sementara itu, efektivitas pengembangan pariwisata diukur berdasarkan aspek atraksi wisata, transportasi, akomodasi, fasilitas pelayanan, dan infrastruktur. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang menggunakan skala Likert dan dokumentasi dari sumber resmi seperti laporan kebijakan dan data statistik pariwisata daerah.

Populasi dalam penelitian ini mencakup pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Tengah yang terlibat dalam implementasi kebijakan pariwisata. Teknik total sampling digunakan karena jumlah pegawai yang terlibat relatif kecil, sehingga seluruhnya dijadikan sampel penelitian. Selain itu, untuk mengukur dampak kebijakan terhadap wisatawan dan masyarakat lokal, penelitian ini juga melibatkan responden dari kalangan pelaku usaha wisata dan pengunjung Pantai Binasi. Pemilihan responden masyarakat dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana mereka yang dipilih adalah pemilik usaha wisata, pengelola akomodasi, pedagang sekitar, serta wisatawan yang telah mengunjungi Pantai Binasi minimal dua kali dalam dua tahun terakhir.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik statistik kuantitatif, meliputi uji korelasi Pearson Product Moment untuk melihat hubungan antara implementasi kebijakan dan efektivitas pengembangan pariwisata, serta analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur kontribusi kebijakan terhadap efektivitas pariwisata. Keabsahan

data diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas, dengan kriteria validitas menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Bartlett's Test serta reliabilitas diuji dengan Cronbach's Alpha. Untuk meningkatkan kredibilitas hasil, dilakukan triangulasi data melalui perbandingan data primer (kuesioner) dan data sekunder (dokumen kebijakan serta laporan statistik Dinas Pariwisata). Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif terhadap efektivitas kebijakan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pengembangan Pantai Binasi Kabupaten Tapanuli Tengah

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi wisata bahari yang cukup besar, salah satunya adalah Pantai Binasi, yang terkenal dengan keindahan alam dan pasir putihnya. Namun, efektivitas pengembangan destinasi ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan wisata. Model implementasi kebijakan Edward III menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jika keempat aspek ini berjalan dengan baik, maka kebijakan pariwisata akan berdampak positif pada peningkatan jumlah wisatawan, kepuasan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan di Pantai Binasi masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pengembangan wisata di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam implementasi kebijakan pariwisata di Pantai Binasi masih belum optimal. Koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat masih lemah, sehingga menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi dalam pengelolaan wisata. Misalnya, pembangunan infrastruktur wisata sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan partisipasi masyarakat, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pengembangan dan keberlanjutan. Kurangnya komunikasi yang efektif juga menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat lokal tentang peluang ekonomi yang dapat mereka manfaatkan dari sektor pariwisata.

Selain itu, sumber daya yang tersedia, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga kerja, masih terbatas. Laporan dari Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah (2023) menunjukkan bahwa hanya 30% dari total anggaran pariwisata yang dapat direalisasikan, sehingga berbagai proyek pembangunan seperti perbaikan jalan, penyediaan listrik stabil, serta pembangunan fasilitas umum tertunda atau tidak berjalan optimal. Keterbatasan ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas layanan yang diterima wisatawan, yang akhirnya memengaruhi tingkat kunjungan ulang ke destinasi tersebut.

Dari sisi disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat rendahnya keterlibatan stakeholder dalam mendukung pengembangan pariwisata. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya melakukan promosi melalui media sosial dan kerja sama dengan agen perjalanan, efektivitas promosi ini masih terbatas akibat minimnya strategi pemasaran berbasis digital yang inovatif. Selain itu, masyarakat lokal belum sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan wisata karena kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam sektor ini.

Terakhir, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan masih menjadi kendala utama. Banyaknya instansi yang terlibat, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup, tanpa adanya koordinasi yang jelas, menghambat efektivitas kebijakan yang

diterapkan. Ketidaksinkronan kebijakan antarinstansi sering kali menyebabkan proyek berjalan lambat atau tidak sesuai dengan kebutuhan wisatawan dan masyarakat setempat.

Efektivitas kebijakan dapat diukur melalui beberapa indikator, salah satunya adalah jumlah kunjungan wisatawan. Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan bahwa jumlah wisatawan ke Pantai Binasi meningkat dari 10.000 pengunjung pada tahun 2020 menjadi 30.000 pada tahun 2023, yang menandakan adanya pertumbuhan positif. Namun, peningkatan ini masih belum optimal karena banyak wisatawan mengeluhkan akses jalan yang sulit, minimnya fasilitas penginapan, serta kurangnya fasilitas umum seperti toilet yang bersih dan memadai.

Dari aspek kepuasan wisatawan, survei menunjukkan bahwa lebih dari 50% wisatawan merasa kurang puas dengan kondisi infrastruktur dan pelayanan yang tersedia. Wisatawan umumnya menginginkan fasilitas yang lebih lengkap, seperti akses Wi-Fi, restoran, serta tempat istirahat yang nyaman. Jika infrastruktur tidak diperbaiki dalam waktu dekat, ada kemungkinan pertumbuhan jumlah wisatawan akan melambat karena minimnya kenyamanan dalam berwisata.

Dari segi dampak ekonomi, meskipun jumlah kunjungan wisatawan meningkat, belum ada peningkatan signifikan dalam pendapatan masyarakat lokal yang bergerak di sektor pariwisata. Hal ini disebabkan oleh rendahnya keterlibatan masyarakat dalam bisnis wisata, seperti pengelolaan homestay, kuliner, dan penyewaan peralatan wisata. Meskipun pemerintah telah mengadakan pelatihan, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, yang mengindikasikan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, permasalahan lingkungan juga menjadi tantangan dalam efektivitas kebijakan pengembangan wisata. Sampah yang ditinggalkan wisatawan masih menjadi persoalan utama, di mana data dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan bahwa sekitar 40% sampah di Pantai Binasi berasal dari wisatawan. Kurangnya regulasi yang ketat dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai menyebabkan penumpukan limbah yang mengancam ekosistem pantai.

Dalam aspek struktur ekonomi lokal, belum terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam perputaran ekonomi masyarakat sekitar Pantai Binasi. Sebagian besar usaha wisata masih dikelola oleh pelaku usaha dari luar daerah, sementara masyarakat lokal belum sepenuhnya memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Minimnya dukungan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan promosi usaha lokal menjadi faktor penghambat utama yang menyebabkan rendahnya daya saing ekonomi masyarakat setempat.

Identifikasi Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pengembangan Pantai Binasi Kabupaten Tapanuli Tengah

Pengembangan Pantai Binasi sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah memerlukan implementasi kebijakan yang efektif agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Seperti yang telah dianalisis sebelumnya, berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan, seperti koordinasi yang lemah, keterbatasan infrastruktur, kurangnya promosi, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta tantangan lingkungan, menghambat optimalisasi potensi wisata Pantai Binasi. Oleh karena itu, beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam pengembangan kawasan wisata ini meliputi optimalisasi komunikasi dan koordinasi antar-stakeholder,

peningkatan infrastruktur, optimalisasi pemasaran digital, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan pengelolaan lingkungan.

1. Optimalisasi Komunikasi dan Koordinasi Antar-Stakeholder

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pariwisata di Pantai Binasi adalah kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan stakeholder terkait. Pengembangan wisata pantai ini melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, serta pelaku usaha dan masyarakat lokal. Ketidakseimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sering kali menyebabkan tumpang tindih program, alokasi anggaran yang tidak efektif, serta lambatnya realisasi proyek pembangunan infrastruktur wisata. Oleh karena itu, perlu dibentuk forum koordinasi pariwisata yang dapat mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan secara kolektif.

Forum ini akan berperan sebagai wadah komunikasi rutin yang mempertemukan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan. Dengan adanya forum ini, setiap stakeholder dapat menyampaikan masukan terkait kebijakan yang dijalankan serta mengidentifikasi kendala yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang lebih baik akan mempercepat realisasi proyek infrastruktur dan memastikan kebijakan yang diterapkan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta wisatawan.

2. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Wisata

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi daya tarik wisata suatu destinasi adalah kualitas infrastruktur dan fasilitas wisata yang tersedia. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kenyamanan wisatawan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Saat ini, akses jalan menuju Pantai Binasi masih terbatas, sementara ketersediaan listrik, jaringan internet, serta fasilitas umum seperti toilet, tempat parkir, dan penginapan masih minim. Hal ini menghambat pertumbuhan sektor pariwisata karena wisatawan cenderung mencari destinasi yang memiliki fasilitas yang lebih baik dan mudah diakses.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam pengembangan wisata Pantai Binasi, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur pendukung. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta juga dapat menjadi solusi dalam membangun fasilitas berkualitas tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Model kerja sama ini dapat diterapkan dalam bentuk investasi bersama atau kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP), di mana pihak swasta dapat berinvestasi dalam pengelolaan penginapan, restoran, serta sarana rekreasi, sementara pemerintah tetap memegang kendali terhadap aspek regulasi dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, pembangunan fasilitas pendukung seperti jaringan Wi-Fi gratis, pusat informasi wisata, serta tempat ibadah di sekitar pantai juga perlu diperhatikan. Dengan tersedianya fasilitas yang lebih baik, Pantai Binasi akan menjadi destinasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi wisatawan domestik maupun internasional.

3. Optimalisasi Pemasaran Digital dan Branding Destinasi

Promosi yang efektif adalah kunci utama dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Binasi. Saat ini, promosi wisata masih mengandalkan metode konvensional, seperti event daerah dan pemasaran dari mulut ke mulut. Meskipun cara ini masih relevan, pemanfaatan teknologi digital dalam promosi pariwisata harus lebih dioptimalkan agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan platform digital seperti Google Travel, TripAdvisor, Instagram, YouTube, serta media sosial lainnya untuk meningkatkan visibilitas Pantai Binasi. Pemerintah daerah dapat menggandeng influencer, travel blogger, serta content creator untuk membuat konten promosi yang menarik dan informatif. Selain itu,

pembuatan website resmi yang menyediakan informasi lengkap tentang Pantai Binasi, termasuk daftar penginapan, restoran, transportasi, serta paket wisata yang tersedia, juga dapat membantu meningkatkan daya tarik destinasi ini.

Selain strategi pemasaran digital, branding destinasi juga harus diperkuat dengan mengangkat keunikan dan keunggulan Pantai Binasi dibandingkan destinasi wisata lain. Misalnya, jika Pantai Binasi memiliki keunggulan dalam keindahan pasir putih dan ombak yang cocok untuk olahraga air, maka branding yang berfokus pada wisata bahari dan ekowisata dapat menjadi strategi pemasaran yang lebih spesifik dan efektif.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan SDM Pariwisata

Agar masyarakat lebih aktif terlibat dalam pengelolaan wisata, diperlukan program pemberdayaan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Banyak masyarakat lokal yang memiliki potensi dalam sektor pariwisata tetapi belum mendapatkan pelatihan dan akses modal usaha yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan program pelatihan yang lebih terarah, seperti pelatihan bahasa asing untuk pemandu wisata, manajemen usaha kecil, serta pelestarian budaya dan konservasi lingkungan.

Selain pelatihan, pemberian insentif bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata juga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam sektor ini. Misalnya, pemerintah dapat memberikan bantuan modal usaha atau subsidi peralatan usaha bagi masyarakat yang ingin membuka homestay, restoran, atau penyewaan peralatan wisata. Dengan adanya dukungan ini, masyarakat dapat lebih berperan dalam menyediakan layanan wisata yang berkualitas, sehingga manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat lebih merata dan berkelanjutan.

5. Penguatan Pengelolaan Lingkungan untuk Wisata Berkelanjutan

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan Pantai Binasi adalah masalah lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah dan konservasi ekosistem pantai. Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah, sekitar 40% sampah di Pantai Binasi berasal dari wisatawan, yang menunjukkan rendahnya kesadaran pengunjung dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jika tidak segera diatasi, masalah ini dapat mengancam keberlanjutan wisata di kawasan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan lingkungan harus lebih ketat, termasuk penerapan sistem denda bagi wisatawan yang membuang sampah sembarangan serta penyediaan fasilitas bank sampah dan program daur ulang yang dikelola oleh masyarakat lokal. Selain itu, edukasi lingkungan bagi wisatawan dan masyarakat juga harus ditingkatkan melalui kampanye kebersihan dan gerakan sadar lingkungan.

Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan organisasi lingkungan dalam program konservasi pantai, seperti penanaman mangrove dan rehabilitasi terumbu karang untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dengan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, wisata Pantai Binasi tidak hanya berkembang sebagai destinasi unggulan, tetapi juga tetap lestari untuk generasi mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Pantai Binasi masih belum optimal dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan wisata ini. Model implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, menunjukkan bahwa keempat aspek tersebut belum berjalan secara maksimal. Komunikasi dan koordinasi antar-stakeholder masih lemah, menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi dalam realisasi program pariwisata. Selain itu, keterbatasan anggaran menghambat pengembangan infrastruktur penting seperti

akses jalan, fasilitas umum, dan layanan wisata yang memadai. Dampaknya, meskipun terjadi peningkatan jumlah wisatawan dari 10.000 pada tahun 2020 menjadi 30.000 pada tahun 2023, pertumbuhan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal. Keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata juga masih rendah, karena kurangnya pelatihan, akses permodalan, dan kebijakan pemberdayaan yang sistematis. Selain itu, masalah lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan degradasi ekosistem pantai, menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi agar wisata Pantai Binasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi kendala yang ada, diperlukan strategi penguatan koordinasi antar-stakeholder, peningkatan infrastruktur, optimalisasi pemasaran digital, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Forum koordinasi pariwisata harus dibentuk untuk meningkatkan sinergi antarinstansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Pantai Binasi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur wisata yang lebih baik, strategi branding yang inovatif, serta edukasi dan insentif bagi masyarakat lokal akan berkontribusi dalam meningkatkan daya saing destinasi ini. Pengelolaan lingkungan yang lebih ketat, termasuk penerapan regulasi pengelolaan sampah dan program konservasi, juga perlu dioptimalkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem pantai. Dengan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, Pantai Binasi dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang berdaya saing, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta meningkatkan daya tarik pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah di tingkat nasional maupun internasional.

REFERENSI

- Agniy, R., & Heryani, S. (2023). Dampak anggaran, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan wisata pantai di Tasikmalaya. *Jurnal Manajemen Pariwisata*, 10(1), 75–90.
- Albertoras Telaumbanua, Asima Yanti Siahaan, & Muryanto Amin. (2023). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama, Nias Selatan. *Perspektif*, 12(1), 212–225. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7858>
- Annisa, T. M., Adriman, A., & Sumiarsih, E. (2024). Struktur Komunitas Bivalvia pada Ekosistem Lamun di Perairan Pantai Binasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Perairan (Aquatic Science)*, 12(3), 366–374.
- Badung, K., & Regency, B. (2024). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata the Lazy River Tubing Tourist Attraction in Penarungan Village, Mengwi District, Badung Regency. 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v6i1.2712>
- Bappeda Tapanuli Tengah, B. P. P. D. K. T. (2023). *Laporan realisasi anggaran dan evaluasi kebijakan pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023*. Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Batubara, N. H. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wisatawan Di Destinasi Pantai Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Dianindarwati, T., Prasetyo, D., & Wardhani, L. (2023). Evaluasi kebijakan pengembangan wisata di Makassar: Perspektif komunikasi dan birokrasi. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Pembangunan*, 18(3), 112–128.
- Faustyna, F. (2023). Pelatihan Komunikasi Krisis Terkait pengelolaan Homestay pada Masyarakat Lokal di Desa Lumban Sui Susi Toruan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 68–78. <https://doi.org/10.53299/bajpm.v3i1.288>
- Hardiman Sihombing, Humaizi, & Harmona Daulay. (2023). Pengembangan Objek Wisata Pantai dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Kabupaten Batu Bara. *Perspektif*, 12(1), 238–250. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7843>
- Khairunnisa, P. (2023). Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Kristin, R., & Salam, R. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(1), 79–96.

- Manurung, W. A., Restu, I. W., & Kartika, G. R. A. (2022). Analisis kelayakan potensi ekowisata Pantai Pandan, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. *Bumi Lestari*, 22(1), 1–11.
- Marini, Y., Marina, N., & Arnita, V. (2023). Potensi Pengembangan Desa Wisata dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan Menggunakan Analisis SWOT di Desa Pematang Serai Langkat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2357–2364. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1581>
- Mayolita Panjaitan, R. Hamdani Harahap, & Hadriana Marhaeni Munthe. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Desa Kuta Jungk Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 12(1), 171–184. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8108>
- Nuraida, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Pariwisata Dan Kebijakan Publik*, 15(2), 45–60.
- Pratama, A. G. (2023). *Potensi pengembangan pariwisata halal Pantai Pandan Tapanuli Tengah*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Sartini, S., Fauziah, I., Khairad, F., & Riyanto. (2023). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan Sebagai Souvenir Di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Pelita Masyarakat*, 4(2), 171–179. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v4i2.8271>
- Simatupang, C. C. (2019). *analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Wisatawan di Destinasi Pantai Binasi Kecamatan Sorkam*.
- Sitorus, H., & Simanjuntak, J. S. B. P. (2023). Penguatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Mendukung Pengembangan Bumdes untuk Pengelolaan Amenitas Desa Agrowisata Alam Berbasis Bambu di Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba. *Pelita Masyarakat*, 4(2), 252–264. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v4i2.8757>
- Situngkir, F., Pringgenies, D., & Sedjati, S. (2022). Determinasi Bivalvia dan Gastropoda Yang Terdapat Di Pantai Binasi, Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah (Determination of Bivalves and Gastropods Found on Binasi Beach, Sorkam, Central Tapanuli). *Jurnal Moluska Indonesia*, 6(2), 70–78.
- Susilo, S. D., Simanjorang, E. F. S., & Siregar, N. A. (2022). Upaya Pengembangan Pantai Alam Geger sebagai Objek Wisata dalam Meningkatkan Tourism Visit dan Economic Sector bagi Masyarakat Desa Kampung dalam Kabupaten Labuhan Batu. *Pelita Masyarakat*, 4(1), 134–147. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v4i1.7604>
- Tanjung, H., Tanjung, I. S., Astuti, R., & others. (2024). Strategi Komunikasi dalam Pemasaran Pariwisata Berbasis Digital Tourism di Kabupaten Tapanuli Tengah. *PERSPEKTIF*, 13(3), 700–707.
- Thohirin, I. H. (2016). *Studi tentang akhlak remaja di pantai Binasi Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah*. IAIN Padangsidimpuan.
- Wirman, W., Yozani, R. E., Sari, G. G., & Yesicha, C. (2018). Pelatihan kompetensi komunikasi lintas budaya dalam mempersiapkan masyarakat sadar wisata di Kota Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS)*, 7(2).